



# **RENCANA KERJA (RENJA)**

**DINAS SOSIAL KOTA JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2023**


**Dinas Sosial Kota Jambi  
Jln. Jend. Sudirman No. 156 Telp. 0741-24193 Fax. 0741 - 31682  
JAMBI - 36128**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas berkat Rahmad – Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2022, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini merupakan proses Penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Jambi 2018 – 2023.

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu organisasi yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu pada Tahun 2023.

Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu tentunya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif untuk kesempurnaan Laporan ini kedepan.

Jambi, 25 Juli 2022  
KEPALA DINAS  
  
  
Dr. NOVIARMAN, ME  
Pembina Utama Muda  
NIP.19611120 198603 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN LALU</b>	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kota Jambi .....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi .....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Jambi....	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI</b> .....	24
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Jambi.....	25
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI</b>	26
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	33

## DAFTAR TABEL

Halaman

<b>Tabel. 2.1</b>	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Jambi dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2022.....	6
<b>Tabel. 2.2</b>	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi.....	14
<b>Tabel. 2.3</b>	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2022.....	19
<b>Tabel. T-C.33</b>	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	27

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam rangka peningkatan harkat, martabat dan kualitas hidupnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang timbul, dengan mengedepankan prakarsa dan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada.

Permasalahan kesejahteraan sosial cenderung meningkat, seiring dengan derasnya arus globalisasi yang melanda dunia termasuk Indonesia, Sementara itu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan social terus meningkat dan professional seiring dengan dengan Hak-haknya selaku warga Negara. Oleh sebab itu berbagai dampak positif dan negative dari persoalan sosial semakin meningkat.

Pembangunan kesejahteraan sosial ke depan akan semakin kompleks dan multi dimensional, karena masalah social berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lapisan bawah, yang dampaknya langsung berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti disintegrasi sosial, diskriminasi sosial, kesenjangan sosial, sistem nilai budaya bangsa (kesetiakawanan sosial) dan sebagainya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah khususnya masalah kesejahteraan sosial diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif, dengan membuat rencana berupa RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 Dinas Sosial Kota Jambi sebagai acuan sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

### 1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 disusun berdasarkan landasan hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
- 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat.
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;
- 12) Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - 15) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Daerah Propinsi, dan Kabupaten/Kota;
  - 16) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025;
  - 17) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi;
  - 18) Peraturan Walikota Jambi Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 ini merupakan salah satu dari serangkaian proses pekerjaan penyusunan program pembangunan daerah. Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2023 adalah untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Jambi yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- b. Untuk Menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Jambi .

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Sosial dan ini dituangkan kedalam 5 (Lima) Bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud & Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

##### BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kota Jambi
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Sosial Kota Jambi
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Jambi
- C. Program dan Kegiatan

##### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

##### BAB V PENUTUP



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI**  
**TAHUN LALU (2022)**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI**

Perangkat Daerah Dinas Sosial terdiri dari satu sekretariat dan empat bidang. Hasil Renja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2022 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Secara rinci hasil kegiatan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Jambi dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2022 Kota Jambi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kota Jambi

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian Renstra PD tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun Mei 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									

1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			6.649.685.913	6.386.187.264	96.04	6.429.076.967	3.125.370.715	48.61
1.06.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP			75.969.849	75.958.970	99.99	80.340.800	38.620.200	48.07
1.06.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan			4.244.192.359	4.186.675.683	98.64	4.345.983.381	2.080.193.015	47.86
1.06.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	-	-	34.560.000	13.400.000	38.77
1.06.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi			66.878.000	55.608.000	83.15	150.600.000	105.012.621	69.73

		Kepegawaian								
1.06.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum			198.951.059	193.091.700	97	166.976.931	66.804.970	40
1.06.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah			1.133.697.858	1.043.979.250	92.09	317.378.255	228.469.400	71.99
1.06.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			256.383.795	181.879.521	70.94	614.931.600	221.636.574	36.04
1.06.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah			673.612.993	648.994.140	96.35	718.306.000	384.633.935	53.55

1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PMKS			1.028.567.040	1.012.626.940	98.45	1.659.895.670	659.181.670	39.71
1.06.02 .2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin PUB yang diterbitkan			37.873.680	36.828.180	97.24	46.111.000	19.411.000	42.10
1.06.02 .2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang diberdayakan			990.693.360	975.798.760	98.50	1.613.784.670	639.770.670	39.64

1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			72.580.220	28.669.020	39.50	85.158.310	10.327.800	12.13
1.06.03 .2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kota Jambi untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	Jumlah OT yang di pulangkan			72.580.220	28.669.020	39.50	85.158.310	10.327.800	12.13
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan Di Layani			1.408.674.7 46	1.209.629.7 75	85.87	1.290.583.58 1	397.121.873	30.77

1.06.04	Rehabilitasi Sosial Dasar	Jumlah			920.752.615	848.137.945	92.11	576.078.792	128.268.020	22.27
.2.01	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di layani								
1.06.04	Rehabilitasi Sosial	Jumlah			487.922.131	361.191.830	74.09	714.504.789	268.853.853	37.63
.2.02	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya								

		Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti yang di layani								
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani			1.373.759.955	1.247.650.075	90.82	1.169.925.840	128.209.980	10.96
1.06.05 .2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	jumlah anak terlantar			-	-	-	39.704.680	11.004.680	27.72
1.06.05 .2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin			1.373.759.955	1.247.650.075	90.82	1.130.221.160	117.205.300	10.37



1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana saat Tanggap Darurat			687.937.642	685.802.642	99.69	737.709.710	324.525.490	43.99
1.06.06 . 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang ditangani			352.712.372	351.127.372	99.55	328.715.550	131350.930	39.96
1.06.06 . 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana			335.225.270	334.675.270	99.84	408.994.160	193.174.560	47.23

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi diukur berdasarkan Tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi

No	Indikator	SPM / standar nasiona L	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam Sosial			-	65 %	70 %	75 %	80 %	-	-	100 %	75 %	80 %	85 %	
2.	Persentase PMKS di Luar Panti yang Tertangani			-	65 %	70 %	75 %	80 %	-	-	67,2 %	75 %	80 %	85 %	

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan pelayanan jasa, Kota Jambi tumpuan bagi penduduk untuk menggantungkan hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik. Pendetang dari luar daerah pun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan bertambahnya penduduk kota sekaligus menambah permasalahan sosial dan Tenaga Kerja yang semakin semakin kompleks. Ke depan permasalahan ini perlu penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan bagian tidak bisa terpisahkan sebagai salah satu dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat, memerlukan perhatian ekstra keras dan penuh dengan kesabaran ekstra tinggi.

Karena itu pemerintah berada pada posisi kunci sebagai pihak yang harus melakukan pengaturan terhadap distribusi dari hasil sumber-sumber ekonomi.

Kedepan kita akan mengupayakan pengembangan program jaminan sosial dan bursa kerja oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial seperti perhatian terhadap pekerja sekaligus penyuluh sosial baik dari unsur masyarakat maupun pegawai negeri yang saat ini belum maksimal.

Isu-isu Strategis yang berkembang tentang Masalah Sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya kapasitas aparatur daerah, keuangan dan asset daerah serta implementasi reformasi birokrasi belum optimal.
- 2) Rendahnya tingkat kedisiplinan ketaatan masyarakat kepada peraturan perundang-undangan, norma agama serta nilai-nilai sosial budaya.
- 3) Meningkatnya jumlah PMKS seiring dengan penambahan penduduk
- 4) Rendahnya akses dan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial
- 5) Belum terpenuhinya fasilitas Pelayanan dan Rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, lansia terlantar, korban Napza, Orang dengan HIV / AIDS dan lain-lain

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Sosial Kota Jambi perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijaksanaan Program operasional dan kegiatan-kegiatan.

Upaya strategis yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Sosial tidak terlepas dari kondisi yang mendukung kegiatan dan faktor-faktor lain dari kegiatan dimaksud. Kondisi

yang akan diuraikan ini dilakukan melalui beberapa analisis yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal.

#### A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

##### ➤ Kekuatan ( Strength )

- a. Stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terjaga dengan baik.
- b. Sinkronisasi dan Koordinasi antara Pemerintah, Kelembagaan Organisasi, Masyarakat dan Pelaku Dunia Usaha dalam mengatasi masalah-masalah Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan
- c. Jumlah aparatur SKPD yang jumlahnya relatif cukup memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Peningkatan peran / partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah-masalah Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan.
- e. Tersedianya Anggaran Dana yang bersumber dari APBD Kota Jambi untuk mendukung Program Kegiatan dan Tugas– tugas operasional.
- f. Terbentuknya struktur kelembagaan Dinas Sosial Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi

##### ➤ Kelemahan ( Weaknesses)

- a. Belum memadainya produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Jambi.
- b. Masih banyaknya penduduk yang berada pada kelompok miskin.
- c. Ketersediaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum akurat seiring dengan pertumbuhan penduduk.
- d. Belum optimalnya implementasi Standar Pelayanan Minimal Aparatur Pemda yang berdampak pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
- e. Belum optimalnya dukungan dan peran serta aktif *stakeholders* daerah (dunia usaha-masyarakat) dalam pengelolaan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan social .
- f. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah berdampak luas terhadap masalah sosial lainnya seperti rendahnya semangat kerja, kurang kreatif dan kurang percaya diri.
- g. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan Sosial sehingga pelayanan pada masyarakat kurang optimal.

## B. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

### ➤ Peluang ( Opportunity )

- a. Potensi sumber daya alam yang masih tersedia yang membuka peluang dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pola pendekatan secara kelompok dalam bentuk KUBE dan peningkatan Usaha Ekonomi Produktif;
- b. Keterlibatan dan peran serta aktif Orsos ditengah – tengah masyarakat & Lembaga masyarakat yang semakin baik dan bekerja sama dalam menangani masalah kesejahteraan sosial seperti yayasan – yayasan, LSM Orsos dan Karang Taruna sesuai fungsi sosialnya
- c. Pengelolaan Sumber Daya Personil dalam mendukung dan membantu tugas-tugas pelayanan Kesejahteraan sosial (Pegawai, Tagana, PSM, )
- d. Partisipasi dunia usaha dilakukan melalui program corporate social responsibility (CSR) merupakan implementasi dan tanggungjawab & Kepedulian perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan dan pelayanan kesejahteraan social & mengatasi pengangguran

### ➤ Ancaman ( Threats )

- a. Tingkat kemiskinan penduduk yang relatif tinggi sehingga menimbulkan permasalahan sosial, seperti : Gepeng (gelandangan dan pengemis), Fakir Miskin, Anak terlantar, Anak Jalanan, Korban Narkoba, Korba HIV/AIDS, Keluarga Rentan, Lansia Terlantar & WTS;
- b. Kurangnya Pemanfaatan Potensi dan sumber daya pembangunan kesejahteraan social dan tenaga kerja,;
- c. Masih banyaknya Perusahaan yang belum memberikan Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Tenaga Kerja melalui Jamsostek, serta permasalahan yang terjadi antara Hak & Kewajiban Perusahaan dengan Tenaga Kerja
- d. Tidak seimbang, angka pencari kerja dengan pasar kerja yang tersedia, serta lowongan pekerjaan dan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh Penyedia Tenaga Kerja, sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran
- e. Kota Jambi sebagai simpul Segi Tiga SIJORI, merupakan daerah transit bagi mobilitas penduduk yang gagal mencari pekerjaan ke daerah lain, serta

- f. kurangnya kemandirian pencari kerja dalam membuka lapangan usaha kerja baru
- g. Rendahnya Tingkat pendapatan masyarakat yang berdampak luas terhadap masalah sosial lainnya seperti rendahnya semangat kerja, kurang kreatif , mandiri dan kurang percaya diri

## 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	7.105.748.418	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	6.493.664.235	
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi	- Persentase Pemberdayaan	100 %	1.825.885.237	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi	- Persentase Pemberd	100 %	1.649.263.770	

			Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PMKS					ayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PMKS			
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		- Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100 %	93.674.141	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		- Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak	100 %	53.099.000	



								Kekerasan			
4.	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan dilayani	80 %	1.419.641.939	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan dilayani	75 %	1.300.831.950	
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani dan	80 %	1.243.243.276	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani	75 %	308.376.270	

			Persentase Fakir Miskin yang Didata dan dilayani					dan Persenta se Fakir Miskin yang Didata dan dilayani			
6.	Program Penanganan Bencana		Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat	80 %	811.480.681	Program Penanganan Bencana		Persentase Penangana n Bencana saat tanggap darurat	75 %	712.680.3 70	

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan pembangunan daerah di Kota Jambi membuka akses yang luas kepada masyarakat dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya melalui mekanisme E-planing musrenbang. Sistem perencanaan tersebut dilaksanakan secara berjenjang dari level terbawah sampai tingkat Kota. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan yang sudah dilaksanakan pada awal tahun 2022, tidak terdapat usulan kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui Dinas Sosial Kota Jambi dengan Program Indikator Kecamatan. Namun ada beberapa usulan dari hasil musrenbang kecamatan yaitu Non Pagu Indikator Kecamatan yang merupakan kegiatan rutin program kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Jambi yaitu pengusulan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, Pelatihan Bagi Disabilitas, Bantuan Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Tongkat Kruk, Etalase Jualan Sarapan, Kemeja Lapangan Karang Taruna, Sound Senam Lansia, Seragam Karang Taruna, Seragam Lansia, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Pengolahan Makanan Tradisional.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat; Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG DENGAN MENEKANKAN TERBANGUNNYA STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG KOKOH BERLANDASKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF DI BERBAGAI WILAYAH YANG DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan.
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional.
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Jambi adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Kepada Keluarga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Jambi adalah :

1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial
2. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Terlantar di Luar Pantli.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI**

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 terdiri dari Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Sosial Kota Jambi terdiri dari 6 Program, 17 Kegiatan 44 Sub Kegiatan dengan Total Rencana Anggaran sebesar Rp. 10.546.000

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Recana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi
<b>01.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Jambi</b>	<b>100 %</b>	<b>6.493.664.235</b>	<b>APBD</b>		<b>7.184.000.000</b>	<b>Kota Jambi</b>
2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	Kota Jambi	BB	65.986.951	APBD		95.340.800	Kota Jambi
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	Kota Jambi	100 %	4.449.294.252	APBD		4.359.345.268	Kota Jambi
2.03	Administrasi Barang	Tertib Administrasi	Kota	100 %	44.286.000	APBD		37.560.000	Kota

	Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jambi						Jambi
2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	Kota Jambi	100 %	169.350.000	APBD		289.900.000	Kota Jambi
2.04	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Kota Jambi	100 %	301.507.298	APBD		216.978.477	Kota Jambi
2.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	100 %	273.603.440	APBD		681.378.255	Kota Jambi
2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Jasa Penunjang Urusan	Kota Jambi	100 %	520.793.600	APBD		624.431.600	Kota Jambi
2.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	100 %	668.842.694	APBD		879.065.600	Kota Jambi



	Daerah								
<b>02</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PMKS</b>	<b>Kota Jambi</b>	<b>100 %</b>	<b>1.649.263.770</b>	<b>APBD</b>		<b>1.900.000.000</b>	<b>Kota Jambi</b>
2.01	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin PUB	Kota Jambi	100 %	33.455.910	APBD		53.263.680	Kota Jambi
2.02	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang diberdayakan	Kota Jambi	100 %	1.615.807.860	APBD		1.846.736.320	Kota Jambi
<b>03</b>	<b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>Kota Jambi</b>	<b>100 %</b>	<b>53.099.000</b>	<b>APBD</b>		<b>115.000.000</b>	<b>Kota Jambi</b>

2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase OT yang di pulangkan	Kota Jambi	100 %	53.099.000	APBD		115.000.000	Kota Jambi
<b>04</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Persentase Rehabilitasi Sosial yang di layani</b>	<b>Kota Jambi</b>	<b>100 %</b>	<b>1.300.831.950</b>	<b>APBD</b>		<b>2.050.000.000</b>	<b>Kota Jambi</b>
2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di layani	Kota Jambi	100 %	591.947.050	APBD		889.956.700	Kota Jambi

2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti yang di layani	Kota Jambi	100 %	708.884.900	APBD		1.160.043.300	Kota Jambi
<b>05</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang dilayani dan Persentase Fakir Miskin yang Didata dan dilayani</b>	<b>Kota Jambi</b>	<b>100 %</b>	<b>336.46.675</b>	<b>APBD</b>		<b>1.750.000.000</b>	<b>Kota Jambi</b>
2.01	Pemeliharaan Anak-Anak terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang dilayani	Kota Jambi	100%	28.084.405	APBD		50.000.000	Kota Jambi
2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin	Kota Jambi	100 %	308.376.270	APBD		1.700.000.000	Kota Jambi

<b>06</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat</b>	<b>Kota Jambi</b>	<b>100 %</b>	<b>712.680.370</b>	<b>APBD</b>		<b>1.150.000.000</b>	<b>Kota Jambi</b>
2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	Kota Jambi	100 %	320.150.570	APBD		640.995.400	Kota Jambi
2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Kota Jambi	100 %	392.529.800	APBD		509.004.600	Kota Jambi
TOTAL								10.546.000.000	

## BAB V

### PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Sosial Kota Jambi diharapkan dapat diinformasikan dan dikomunikasikan ke seluruh aparat dalam Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi. Rencana Kerja ini memungkinkan seluruh anggota organisasi dapat memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas dan dijabarkan dalam program dan kegiatan selama tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Jambi ini merupakan rangkaian rencana program kegiatan untuk Tahun 2023 yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Jambi sebagai penjabaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional, hal ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Jambi. Untuk ini diharapkan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Jambi yang direncanakan akan terlaksana dan terkoordinasi dengan baik serta dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan strategis dalam kurun waktu tersebut akan senantiasa mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana ini, semoga dapat bermanfaat dan dalam menjalankan tugas kedepannya mempunyai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas yang diemban dalam kegiatan pembangunan Daerah Kota Jambi.

Jambi, 25 Juli 2022

KEPALA DINAS



*[Handwritten Signature]*

Drs. NOVIARMAN, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 196.1120.198603.1.002